

# ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA DINOYO TAHUN ANGGARAN 2020

**Naufal Lu'alfian Afif**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[lualfianafif@gmail.com](mailto:lualfianafif@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This study was conducted to determine the management of the planning, implementation and accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Dinoyo village in accordance with PERMENDAGRI Number 20 of 2018 concerning village financial management. This research is a type of descriptive qualitative research using primary data and secondary data where the primary data is in the form of direct observations and interviews to obtain planning, implementation, and accountability data. The results of this study indicate that the stages of village financial management related to planning, implementation and accountability have been carried out properly and are in accordance with PERMENDAGRI Number 20 of 2018.*

**Keywords:** APBDes, PERMENDAGRI, Planning, Implementation, accountability

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilaksanakan untuk bertujuan mengetahui pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Dinoyo sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dimana data primer berupa hasil pengamatan langsung dan wawancara untuk mendapatkan data perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa yang terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan baik dan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

**Kata kunci:** APBDes, PERMENDAGRI, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan kawasan tempat tinggal masyarakat yang saling berkerjasama dengan kebiasaan norma dan tata cara yang sama yang mengatur kehidupan kemasyarakata. Desa merupakan kawasan tempat tinggal masyarakat yang saling berkerjasama dengan kebiasaan norma dan tata cara yang sama yang mengatur kehidupan kemasyarakata. Pemerintahan desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pimpinan lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa.

Berdasarkan isi PERMENDAGRI 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Dengan adanya peraturan Menteri seperti ini seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang disetujui oleh pemerintahan desa dan BPD. APBDES merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. APBDes adalah instrument sangat penting karena sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Maka peran penting pemerintahan sangat diharapkan dalam memanfaatkan hasil potensi desa melalui APBDes, sehingga pengelolaan APBDes harus disusun dengan benar-benar berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakatan desa. APBDes merupakan instrument yang sangat penting ditingkat desa, tak terkecuali Desa Dinoyo. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dinoyo sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik digunakan untuk transparansi kepada publik untuk dapat memenuhi hak-hak publik dan sektor publik yang dimaksud dalam akuntansi ini terdiri dari juga membutuhkan akuntansi jenis ini. Sektor publik adalah gabungan dari berbagai macam organisasi yang lebih kompleks mulai dari lembaga pemerintah di daerah dan pusat dan lembaga non pemerintah, badan usaha milik negara, rumah sakit dan lembaga pendidikan. (Hartono, 2021;2)

### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018**

Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Bab-bab tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APB Desa, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan. Definisi Keuangan Desa dalam peraturan terbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, definisi keuangan desa tidak berubah atau masih didefinisikan sama seperti dalam Permendagri Nomor 113 Tahun

2014.

## **Desa**

Desa adalah wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang rendah dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa.

Menurut Sumeru Desa merupakan kawasan tempat tinggal masyarakat yang saling berkerjasama dengan kebiasaan norma dan tata cara yang sama yang mengatur kehidupan kemasyarakatan (Sumeru, 2016).

## **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permuyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. dalam pasal undang-undang desa No 6 tahun 2014, disebutkan bahwa APBDes memuat tiga unsur yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan Dana desa.

Menurut Sumpeno (2015), APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapata dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes, pemerintahan desa akan memiliki rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang ada dan yang digunakan. Dengan demikian, perangkat desa harus memiliki fungsi pengelolaan anggaran desa yang baik. Artinya, anggaran desa digunakan secara berimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuanagn daerah untuk mewujudkan terciptanya good governance.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan study kasus. Penelitian deskriptif adalah bertujuan untuk memperoleh data, mengumpulkan, dan

menganalisis data yang diperoleh dari tempat penelitian.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Dinoyo yang berlokasi di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dimulai dari Bulan Maret sampai Mei untuk melakukan survei di tempat penelitian.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan symbol angka atau bilangan. Data kualitatif dapat diperoleh dari melalui observasi, wawancara, dan pengamatan. Sedangkan data kuantitatif adalah sebuah data berupa angka yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan dasar teori yang ada. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari survei, wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan secara langsung dengan judul penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung. Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan pengamatan kepada objek penelitian. Dokumentasi adalah dilakukan untuk memperoleh data dari arsip-arsip atau dokumen.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Perencanaan APBDes**

Fungsi Perencanaan dalam APBDes adalah sebagai acuan dan sebagai pedoman dalam manajemen merencanakan kegiatan atau program pada tahun yang bersangkutan. Perencanaan dapat diartikan memilih, Menyusun serta keinginan untuk mencapai hasil atau target yang diharapkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan manfaat dari program itu sendiri.

Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo tahun anggaran 2020 diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Tahun Anggaran 2020**

1. PENDAPATAN	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 148.740.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.256.989.732,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 3.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp. 1.408.729.723,00</b>
2. BELANJA	
a. Bidang Penyelenggaran pemerintahan desa	Rp. 650.153.573,19
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 689.164.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 67.564.959,88
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 39.615.000,00
e. Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 10.500.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp. 1.456.998.333,07</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>( Rp. 48.268.610,07)</b>
3. PEMBIAYAAN	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 108.268.610,07
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 60.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>Rp. 48.268.610,07</b>
<b>SISA LEBIH/(KURANG)</b>	<b>Rp. 0,00</b>
<b>PERHITUNGAN</b>	
<b>ANGGARAN</b>	

Sumber : Dokumen Desa Dinoyo

Table 4.2 menunjukkan bahwa APBDes di Desa Dinoyo tahun anggaran 2020 memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.408.729.723, dan belanja sebesar Rp. 1.456.998.333,07, dari total anggaran belanja dialokasikan pada bidang penyelenggaran pemerintah desa sebesar Rp. 650.153.573,19, bidang pembangunan Rp. 689.164.800, bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 67.564.959,88, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 39.615.000, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan

mendesak desa sebesar Rp. 10.500.000,

Karena munculnya Virus Covid-19 maka beberapa anggaran ada yang bergeser atau dialihkan ke bidang penanggulangan bencana dikarenakan lebih diprioritaskan. Contohnya bidang pembangunan yang semula Rp. 689.164.800, menjadi Rp. 300.356.800. dengan perubahan anggaran sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Tahun Anggaran 2020**

1. PENDAPATAN	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 148.740.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.245.896.521,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 4.500.000,00
<hr/>	
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.399.136.521,00
2. BELANJA	
a. Bidang Penyelenggaran pemerintahan desa	Rp. 664.301.531,19
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 300.356.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 50.338.599,88
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.096.500,00
e. Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 439.130.900,00
<hr/>	
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.482.224.331,07
<hr/>	
SURPLUS/(DEFISIT)	( Rp. 83.087.810,07)
3. PEMBIAYAAN	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 108.268.610,07
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 25.180.800,00
<hr/>	
PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 83.087.810,00
<hr/>	
SISA LEBIH/(KURANG)	Rp. 0,00
<hr/>	
PERHITUNGAN ANGGARAN	

Sumber : Dokumen Desa

#### **Analisis Pelaksanaan APBDes**

Pelaksanaan menjadi bagian yang terpenting dalam suatu kegiatan dan pencapaian program yang berdasarkan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Anggaran Biaya harus diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Ketua pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, namun tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerintahan Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2020 terkait Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

**Table 4.3**  
**Realisasi Anggran Bidang**  
**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	664.301.531,19	587.042.776,86	88,37
1	Sub Bidang Penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	589.460.386,00	542.162.821,86	91,98
2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.537.423,00	10.530.000,00	99,93
3	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Kuangan dan Pelaporan	40.049.745,19	10.277.000,00	25,66
4	Sub Bidang Pertahanan	24.253.977,00	24.072.955,00	99,25

Sumber : Dokumen Desa

Dalam Bidang Pemerintahan Desa Terdapat kegiatan yang belum terlaksana pada Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan yaitu kegiatan pengisian perangkat desa yaitu pengisian Kepala Dusun Dinoyo semula yang diprioritaskan pada tahun 2020,

hal itu tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada dua factor, yang pertama dikarenakan sumber anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut ada keterlambatan pendistribusiannya ke rekening desa. Kedua terjadinya adanya wabah virus Covid-19, sehingga desa fokus dalam pencegahan dan penanggulangan wabah tersebut.

## 2. Bidang Pembangunan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerintahan Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2020 terkait bidang pembangunan desa sebagai berikut :

**Table 4.4**  
**Realisasi Anggaran Bidang Pembangunan Desa**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	300.356.800	190.351.200	63,38
1	Sub Bidang Pendidikan	37.600.000	37.600.000	100,00
2	Sub Bidang Kesehatan	138.810.200	111.373.000	80,23
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91.821.600	30.086.000	32,77
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.125.000	4.292.200	17,08
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	7.000.000	7.000.000	100,00

Sumber : Dokumen Desa

Dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat 17 program kerja tetapi yang terrealisasi hanya 10 program kerja. Hal itu terjadi karena yang semula dianggarkan dalam perencanaan diawal yang banyak bergeser atau dialihkan pada bidang penanggulangan bencana.



### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerintahan Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2020 terkait Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

**Table 4.5**  
**Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	50.338.599,88	43.543.500,00	86,50
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakatan	3.907.983,88	3.895.000,00	99,67
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.219.616,00	25.217.500,00	99,99
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.028.000,00	4.026.000,00	100,00
4	Sub Bidang kelembagaan Masyarakatan	17.183.00,00	10.403.000,00	60,54

Sumber : Dokumen Desa

Dalam Sub Bidang Kelembagaan Masyarakatan terdapat satu bidang yang realisasinya sebesar 46% hal itu dikarenakan dalam hal kegiatan PKK merupakan kegiatan kelompok/perkumpulan sehingga bertentangan dengan peraturan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Oleh sebab itu beberapa kegiatan PKK pada tahun 2020 tidak bisa melaksanakan sesuai sesuai jadwal perencanaannya.

### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerintahan Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2020 terkait Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

**Table 4.6**  
**Realisasi Anggaran Pemberdayaan Masyarakat**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	28.096.500,00	7.260.000,00	25,84
1	Sub Bidang Pertanian dan Pertenakan	10.740.000,00	0,00	0,00
2	Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa	3.752.500,00	3.752.500,00	100,00
3	Sub Bidang Pemberdayaan, Perempuan Anak dan Keluarga	11.614.000,00	3.507.500,00	30,20
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.990.000,00	0,00	0,00

Sumber : Dokumen Desa

Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa hanya terrealisasi sebesar 25,84% hal itu dikarenakan sebagian besar dalam kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan yang berkelompok/perkumpulan sehingga bertentangan dengan peraturan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran wabah covid-19. Oleh sebab itu ada beberapa kegiatan pada tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal perencanaannya.

#### **5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerintahan Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2020 terkait Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebagai berikut :

**Table 4.7**  
**Realisasi Anggaran Penanggulangan bencana Desa Dinoyo**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TINGKAT PENCAPAIAN (%)
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	439.130.900	410.710.900	93,53
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	79.139.900	52.510.900	66,36
2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000	358.200.000	99,50

Sumber : Dokumen Desa

Dalam bidang penanggulangan bencana menunjukkan bahwa realisasinya sudah terlaksana dan dilakukan dengan sangat baik, pencapaian realisasi kedua program kerjanya dikategorikan sangat baik hal tersebut dapat dilihat dari persentasenya yaitu 93,53%.

#### **Analisis Pertanggungjawaban APBDes**

Tanggungjawab adalah sebuah bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan masyarakat kepada pemerintah desa untuk dikelolanya. Dari bentuk pertanggungjawabannya, di Desa Dinoyo bersifat administrative yamana pertanggungjawabann pemerintahan desa atas kegiatan pengelolaan Anggaran Pengelolaan dan Belanja Desa secara administrative berupa surat SPJ dan dilaksanakan secara structural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian Camat diteruskan kepada Bupati.

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dinoyo secara umum sudah baik, hal itu dapat terbukti dari hasil wawancara dengan sekretaris desa yang mengatakan bahwa setiap Iaporan realisasi anggaran sepenuhnya berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 maupun dengan peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019.

## **Pembahasan**

Dalam analisis perencanaan APBDes diawali dengan musyawarah dusun setelah itu dilakukan musyawarah desa untuk menindak lanjuti program-program yang sudah direncanakan. Setiap musyawarah desa diwajibkan dihadiri oleh anggota desa beserta BPD, kepala dusun, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat. Ketua BPD lah yang mempunyai wewenang untuk menyetujui kelanjutan program kerja tersebut.

Dalam analisis pelaksanaan APBDes di desa Dinoyo Tahun anggaran 2020 telah disetujui 17 program kerja. Akan tetapi dikarenakan munculnya Covid-19 terdapat beberapa anggaran yang dipindahkan atau dialihkan, contohnya bidang pembangunan sebagian besar anggarannya dialihkan di bidang penanggulangan bencana.

Analisis pertanggungjawaban APBDes di desa Dinoyo terbilang tidak ada masalah. Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 maupun dengan kebijakan pemerintahan Bupati Mojokerto. Pelaporan sudah dilakukan secara bertahap atas perkembangan pembangunan dan perkembangan bantuan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan APBDes di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil analisis data seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Dinoyo secara umum sudah baik,
2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun pencapaian pembangunan hanya sebesar 63,38% dari total anggaran dikarenakan adanya pergeseran atau dialihkan ke bidang penanggulangan bencana, sedangkan bidang penanggulangan bencana sudah sangat baik dengan hasil 93,53%.
3. pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai berdasarkan kebijakan pemerintah, baik kebijakan Permendagri Nomor 20

Than 2020 maupun kebijakan Bupati Mojokerto.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka saran yang dapat penulis ajukan terkait dengan penelitian ini adalah :

- 1) Perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari program pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan selalu mengikuti kebijakan pemerintahan yang berlaku, agar pemerintahan desa dapat mengelola anggaran dengan baik.
- 2) Fokus terhadap masyarakat sebagai subjek pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan peranan kepada masyarakat sehingga masyarakat sepenuhnya ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, untuk penelitian di lokasi penelitian yang sama penulis mengharapkan mengharapkan meneliti terkait pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap penyusunan APBDes.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanjung Marwo / JURNAL MAHASISWA.* (n.d.). Retrieved April 25, 2022, from <https://jurnal-citra-ekonomi.com/index.php/jurnalmhs/article/view/112>

Alfa Zikri, 2021. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantang Singingi). *Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan. Vol. 2 No. 2.*

Billy Sumampouw, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan (2022) Evaluasi Perencanaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Waleo Kecamatan kema Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum).* Universitas Sam Ratulangi

- Hantono, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain, Anny Widiasmara, Umi Rahma Dhany, Siswadi Sululing, Maya Novitasari, Joni Hendra, Siti Amerieska, Suryaningsi, Tatik Amani, Sanusi Ariyanto, Desak Nyoman Sri Werastuti, Saiful Muchlis. *Buku Digital Akuntansi Sektor Publik* (2021)
- Habibi, M., Nasution, E. R., & Afif, Z. (2020). Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). *Jurnal Pioner LPMM Universitas Asahan Vol. 6 No. 2 Mei 2020*, 265.
- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 (2015)*. STIESIA Surabaya.
- Hendri, Muryati, dan Fauziyah, 2021. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tanjung Marwo. *Universitas STIE-GK Muara Bulian. Jurnal mahasiswa Vol. 2 No. 2*.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Gosyen Publishing.  
[gosyenpublishingcv@gmail.com](mailto:gosyenpublishingcv@gmail.com)
- Husna, M., Afif, Z., & Simanjuntak, K. (n.d.). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( Studi Di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan )*. 8(1), 22–27.
- Leonardo Yosua Liando, Linda Lembey, dan Heince R.M Wokas (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 5 No. 2 Juni 2017, Hal 1474-1483*,
- Maulidiah, S., & Si, M. (2016). Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(1), 143–153.
- Mariet Karolina Goo, Herni Sunarya, dan Maryono (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018-2020). *Jurnal Akuntansi (JA). Universitas Muhammadiyah Kupang. Vol. 9 No. 3 September 2021 Hal. 1-12*.
- Miftahul Husna, Zaid Afif, dan Komis Simanjuntak (2022). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan). *Jurnal Pionir LPPM. Universitas Asahan. Vol 8 No. 1 Januari 2022*.
- Masrudiyanto, Erna Kartika, Nyoman Oky Novianti Sari, dan Nyoman Depi Jayantini (2017). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika. Universitas Pendidikan Ganesha*.

Vol. 7 no. 1, April 2017.

- Pakaya, O., Pakaya, J. S., Madya, P., Kantor, P., Hukum, W. K., & Gorontalo, H. (n.d.). *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks PEMBERIAN KEWENANGAN PADA DESA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH (THE PROVIDING OF AUTHORITY TO VILLAGE IN THE CONTEXT OF REGIONAL AUTONOMY)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2018. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri
- Pratiwi, Y., & Pamungkas, B. (2018). Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(1), 059–072. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v2i1.46>
- Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika. Universitas Muhammadiyah Riau. Vol. 9 no. 1, Juni 2019*.
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilek*, 7(2), 139–148.
- Sarlin Nawa Pau, SE., M.Si., Cf., Adhitya Agri Putra, SE., M.Acc., Ak., C., Angga P. Karpriana, SE., MAcc., Ak., C., Meliza Putrianti Zifi, SE., M. A., Maria Elerina Douk Tunti, SE., M. S., Moni W. Muskanan, SE., MPA, Cf., Yohana Febiani Angi, SE., M., Maria P. L. Muga, SE., M.Si., A., & I Komang Arthana, SE., M.Si., Cf. (2021). Transparansi Dan Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi*,
- Shafira Qurrata Ayun (2020). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nglambang Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Universitas Brawijaya. Vol. 8 No. 2*.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.21070/JKMP.V4I1.198>
- Sunarya, H. (2021). Analisis Kinerja Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi (Ja)*, 8(2), 1–12. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/460>
- Suwarno, J. (2012). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan KTP Dan KK Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 1, 184–213.
- Tio fanta Purba dan Mas Ut (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*. Vol 8 No. 2, Desember 2021.

Vina Al Vinatur Rizqiyah dan Lilis Ardini (2019). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. STIESIA Surabaya*



